

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH

20
24

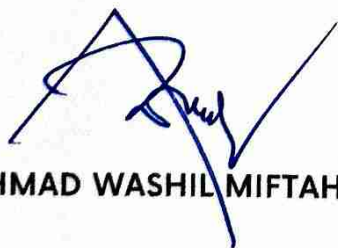
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik .

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 15 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH



ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 103.62% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 83.05% dengan kategori "TINGGI" dan efisiensi sebesar 6.96%.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 109.404.068.905,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.90.859.936.862.08 atau 83.05%.



**Capaian kinerja
103.62
Capaian anggaran
83.05**

DAFTAR ISI

I

Kata Pengantar

10

BAB II Perencanaan Kinerja

II

Ringkasan Eksekutif

16

BAB III Akuntabilitas Kinerja

III

Daftar Isi

37

BAB IV Penutup

01

BAB I Latar belakang

39

Lampiran

LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 diharapkan dapat :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik,
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerjanya.

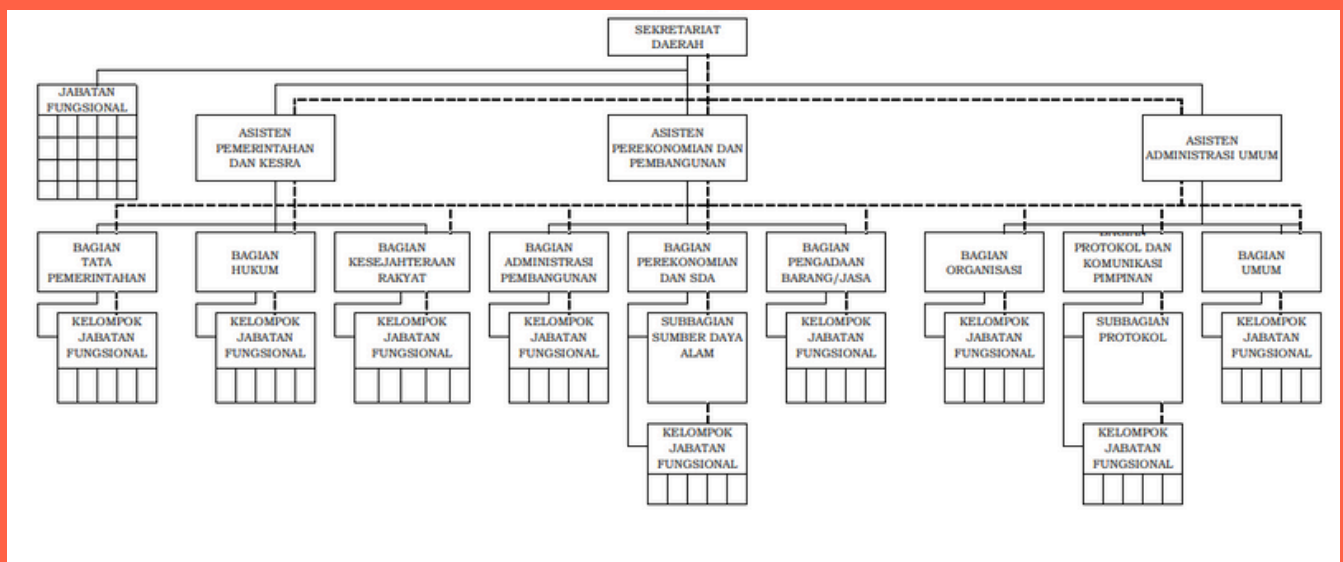


GAMBARAN UMUM

A Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai upaya mewujudkan kinerja, Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan administratif dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perangkat Daerah
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



B. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai sebanyak 122 orang (per 31 Desember 2024) dengan rincian sebagai berikut:

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN 2	• 19 orang
2	GOLONGAN 3	• 82 Orang
3	GOLONGAN 4	• 16 Orang
4	GOLONGAN IX	• 5 Orang
JUMLAH		• 122 Orang

C. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 berjumlah Rp.109.404.068.905 Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.107,271.244.506,00 mengalami peningkatan sebanyak Rp.2.132.824.399 atau 1.98% rincian anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp.65.174.845.593
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp.40.979.494.074
- Program Perekonomian dan Pembangunan Rp.3.249.729.238

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	AGAR DOKUMEN RENSTRA DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA	SINKRONISASI DOKUMEN RENSTRA DAN RKA 2024
2	TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA DIMONITOR PENCAPAIANNYA	MONEV RENCANA AKSI
3	TARGET KINERJA YANG DIPERJANJIKAN DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN	SINKRONISASI PERJANJIAN KINERJA DENGAN SKP KEPALA OPD
4	DOKUMEN RENSTRA DI REVIU SECARA BERKALA	REVIU DOKUMEN RENSTRA
5	AGAR PENYAJIAN INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA DIJADIKAN KEPEDULIAN SELURUH PEGAWAI, DIGUNAKAN DALAM PENYESUAIAN PERENCANAAN KINERJA DAN BISA MEMPENGARUHI BUDAYA KERJA	SOSIALISASI LAPORAN KINERJA
6	MENINGKATKAN IMPLEMENTASI SAKIP DENGAN MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HAS EVALUASI AKIP INTERNAL	MENYUSUN MATRIK TINDAK LANJUT
7	HASIL EVALUASI AKIP INTERNAL DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA SERTA MENDUKUNG EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KINERJA	MENYUSUN PERBANDINGAN AKIP TH 2022 DENGAN 2023

E. Permasalahan Utama (strategic issued)

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah antara lain:

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Sekretariat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Global	1. 1.	Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19	Lintas Sektor	Pengarusutamaan Kebijakan Pembangunan Pasca Pandemi
	1. 2.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Lintas Sektor	Pengarusutamaan Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	1. 3.	Revolusi Industri 4.0	Gresik Mapan, Gema Karya	Optimalisasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
	1. 4.	Perubahan Iklim	Gresik Lestari	Pengarusutamaan Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di lingkup Perubahan Iklim
	1. 5.	Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia	Lintas Sektor	Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia
Nasional	2. 1.	Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024	Lintas Sektor	Integrasi Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024 dalam perumusan kebijakan Daerah
	2. 2.	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019	Gresik Mapan	Harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah

	2. 3.	Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital	Gresik Mapan, Gema Karya	Perumusan kebijakan perekonomian inklusif
	2. 4.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Gresik Mapan, Gresik Cerdas, Gresik Sehat	Integrasi pencapaian standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pembangunan Daerah
	2. 5.	Agenda Pembangunan Jawa Bali	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Jawa Bali dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah
Jawa Timur	3. 1.	Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Lintas Sektor	Harmonisasi Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dalam
				perumusan kebijakan pembangunan Daerah
	3. 2.	Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah
Gresik	4. 1	Tata Kelola Pemerintahan <i>Agile</i> berbasis Smart City dan Satu Data	Gresik Akas	Peningkatan tata kelola organisasi yang dinamis
	4. 2	Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Reformasi Birokrasi	Gresik Akas	Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan secara <i>by design, by process</i> , dan implementatif
	4. 3	Pengentasan Kemiskinan secara Inklusif	Gresik Seger	Pengarusutamaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan inklusif
	4. 4	Daya Saing Daerah	Lintas Sektor	Perumusan kebijakan pembangunan untuk pembiayaan alternatif pembangunan Optimalisasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

4.5	Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah
4.6	Penanggulangan Banjir Kali Lamong	Gresik Mapan	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Banjir Kali Lamong
4.7	Kemandirian Desa	Gresik Mapan	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's)
			Keberdayaan Kelurahan
4.8	Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Agropolitan dan Minapolitan	Gresik Agropolitan	Perumusan kebijakan dilingkup perekonomian inklusif
4.9	Ketenagakerjaan	Gema Karya	
4.10	Kualitas Pelayanan Pendidikan	Gresik Cerdas	Optimalisasi perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat
4.11	Kualitas Pelayanan Kesehatan	Gresik Sehati	
4.12	Keadilan dan Kesetaraan Gender	Lintas Sektor	Keadilan dan Kesetaraan Gender
4.13	Pengarusutamaan Hak Anak	Lintas Sektor	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's)
4.14	Pengarusutamaan Keluhuran Keagamaan Gresik	Gresik Barokah	Pengarusutamaan Keluhuran Keagamaan Gresik
4.15	Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Gresik Lestari	Harmonisasi Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Parumusan Kebijakan Daerah

4.5	Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah
4.6	Penanggulangan Banjir Kali Lamong	Gresik Mapan	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Banjir Kali Lamong
4.7	Kemandirian Desa	Gresik Mapan	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's)
			Keberdayaan Kelurahan
4.8	Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Agropolitan dan Minapolitan	Gresik Agropolitan	Perumusan kebijakan dilingkup perekonomian inklusif
4.9	Ketenagakerjaan	Gema Karya	
4.10	Kualitas Pelayanan Pendidikan	Gresik Cerdas	Optimalisasi perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat
4.11	Kualitas Pelayanan Kesehatan	Gresik Sehati	
4.12	Keadilan dan Kesetaraan Gender	Lintas Sektor	Keadilan dan Kesetaraan Gender
4.13	Pengarusutamaan Hak Anak	Lintas Sektor	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's)
4.14	Pengarusutamaan Keluhuran Keagamaan Gresik	Gresik Barokah	Pengarusutamaan Keluhuran Keagamaan Gresik
4.15	Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Gresik Lestari	Harmonisasi Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Parumusan Kebijakan Daerah

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja sekretariat daerah Kabupaten Gresik selama tahun 2



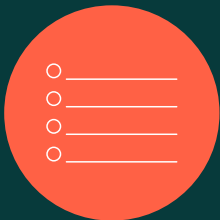
Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.



Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.



Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN 1

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi

Indikator Kinerja :
INDEKS SPBE

TUJUAN 2

Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan

Indikator Kinerja :
INDEKS INOVASI DAERAH

SASARAN

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, & umum yang responsif

Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel

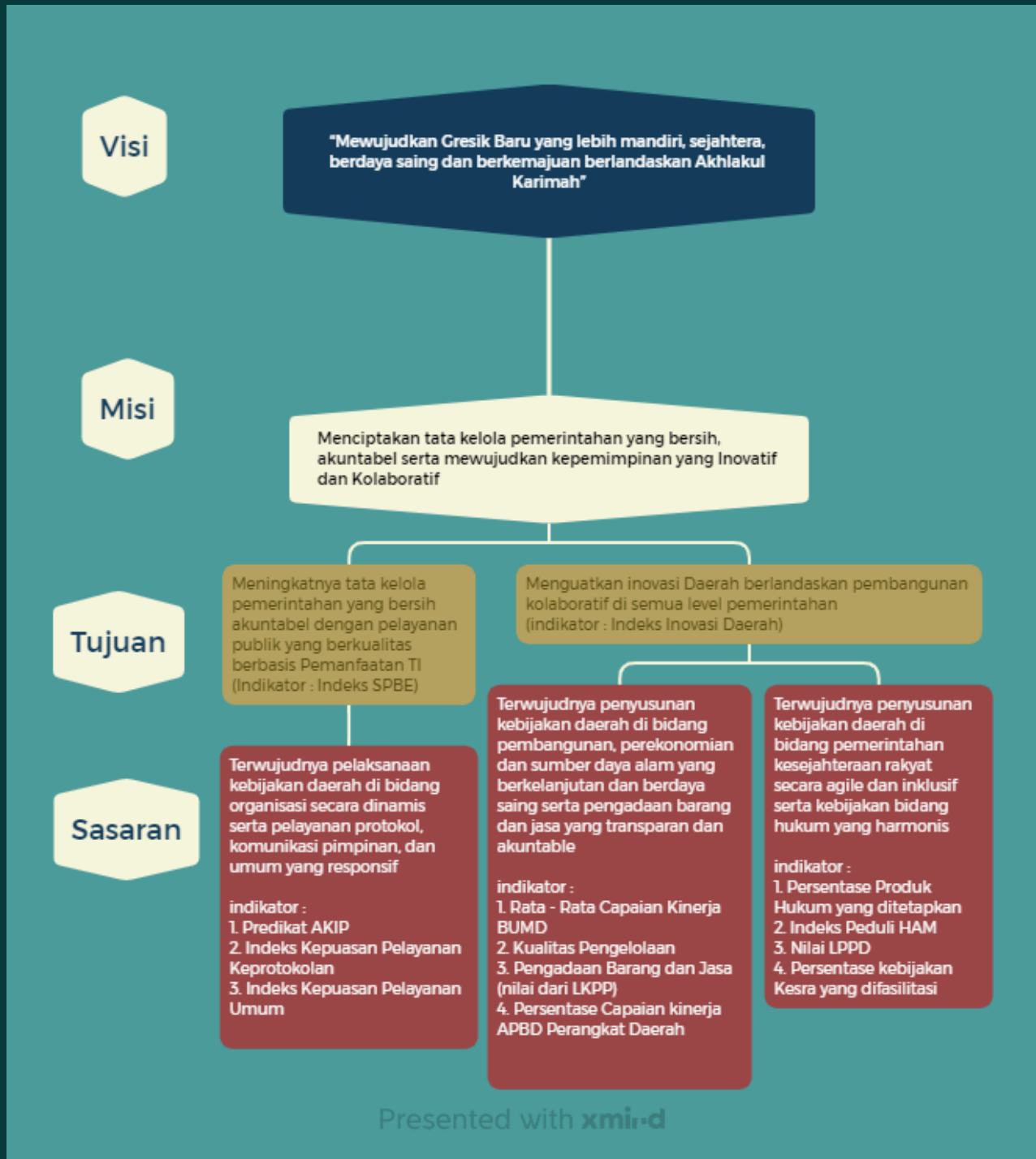
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis

- Predikat AKIP
- Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan
- Indeks Kepuasan Pelayanan Umum
- Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD
- Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)
- Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah
- Persentase Produk Hukum yang ditetapkan
- Indeks Peduli HAM
- Nilai LPPD
- Persentase kebijakan Kesra yang difasilitasi

Matrik keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah tahun 2021-2026

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	>3	>3,1	>3,2	>3,25	>3,3	>3,35
		Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Indeks Peduli HAM	-	>75	>75	>75	>75	>75
	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan SDA secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	level 3	level 3	level 3	level 3	level 4	level 4
		Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD			75%	75%	75%	75%
		Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah			75%	75%	75%	75%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	81.5	82	82.5	83	83.5	84
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

B. CASCADING



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SASARAN	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ditetapkan dalam surat keputusan Menteri dalam Negeri
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan dibagi Jumlah Kebijakan yang dibutuhkan x 100%	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tahun berkenaan Roadmap /rencana aksi/dokumen perencanaan sektoral
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan dibagi Jumlah Usulan Kebijakan x 100%	Dokumen lembaran daerah, berita daerah dan register keputusan kepala daerah
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	Mengacu Permenkumham 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah/Kota Peduli HAM	Nilai Kabupaten/kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 80% (delapan puluh persen) penyerapan APBD dibagi jumlah Perangkat Daerah x 100%	Dokumen Pelaporan realisasi PAPBD
	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun 2019 tentang model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan hasil penilaian LKPP
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	Jumlah realisasi pendapatan BUMD dibagi target pendapatan x 100% dibagi jumlah BUMD	Dokumen lembaran daerah, berita daerah dan register keputusan kepala daerah
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen Hasil evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN RB
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

D. PERJANJIAN KINERJA

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET
			2024
Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.25
		Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90%
		Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	75
	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	level 3
		Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75%
		Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75%
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP
Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan			sangat Baik
Indeks Kepuasan Pelayanan Umum			sangat Baik

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris Daerah dengan Bupati Gresik tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% < 100%	sangat tinggi
2	76% < 90%	tinggi
3	66% < 75%	sedang
4	51% < 65%	rendah
5	< 50%	sangat rendah

Capaian TUJUAN Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut :

TUJUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI IK : INDEKS SPBE	4.28	4.32	100.92%
menguatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif disemua level pemerintahan IK : INDEKS INOVASI DAERAH	45.92	54.43	118.53%

Berdasarkan 2 (dua) indikator tujuan Sekretariat Daerah terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja di kategori “Sangat tinggi”. Sedangkan satu indikator kinerja dengan capaian kinerja di kategori “Sedang”

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.25	3.07	94.53%	SANGAT TINGGI
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%	67.62%	67.62%	SEDANG
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90%	98.70%	109.67%	SANGAT TINGGI
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	75	95.6	127.47%	SANGAT TINGGI

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	level 3	level 3	100%	SANGAT TINGGI
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75%	88.59%	118.12%	SANGAT TINGGI
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75%	91.30%	121.73%	SANGAT TINGGI
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	83	80.60	97.11%	SANGAT TINGGI
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	SANGAT TINGGI
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	SANGAT TINGGI
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				103.62	SANGAT TINGGI

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 10 (sepuluh) indikator sasaran, 9 (sembilan) indikator memiliki capaian kinerja >91% kategori "SANGAT TINGGI" dan 1 (satu) indikator persentase kebijakan kesra yang memiliki capaian kinerja 68% kategori "SEDANG" hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan mekanisme pemberian bantuan beasiswa sehingga tidak dapat tidak dicairkan pada tahun 2024.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	REALISASI 2023	REALISASI 2024	KETERANGAN
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.07	3.07	Nilai Belum rilis
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	136.59	67.62%	Menurun
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	91.92%	98.70%	Meningkat
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	94.3	95.6	Meningkat
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	level 3	level 3	Tetap
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	83%	88.59%	Meningkat
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	93.48%	91.30%	Menurun
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	81.93	80.60	Menurun
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkat
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkat

Sebagaimana pada tabel diatas, pengukuran capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa dari 10 (sepuluh) indikator sasaran, terdapat 5 (lima) indikator yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 , terdapat 3 (tiga) indikator mengalami penurunan , terdapat 1 (satu) indikator Nilai LPPD yang belum rilis dari kementrian dalam negri dan 1 (satu) indikator tetap

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET 2026	REALISASI 2024	KETERANGAN
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.35	3.07	-
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100	67.62%	-
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90	98.70%	+
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	75	95.6	+
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	Level 4	level 3	-
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75	88.59%	+
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75	91.30	+

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET 2026	REALISASI 2024	KETERANGAN
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	84	80.60	-
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	Sangat Baik	+
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	Sangat Baik	+

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 terdapat 6 (enam) indikator dengan tingkat kemajuan POSITIF atau melebihi dari target akhir tahun 2026 rencana strategis dan 4 (empat) indikator dengan tingkat kemajuan NEGATIF atau belum melampaui dari target akhir tahun Renstra 2026.

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	PROV JATIM / KAB. KOTA LAIN	KAB. GRESIK	LEBIH RENDAH/ LEBIH TINGGI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.69	3.07	lebih rendah dibandingkan Prov Jatim
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi		67.62%	-
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan		98.70%	-
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	91.77	95.6	lebih tinggi dibandingkan rata kab/kota

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	PROV JATIM / KAB. KOTA LAIN	KAB. GRESIK	LEBIH RENDAH/ LEBIH TINGGI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	level 3	level 3	sama dengan Kab/Kota
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD		88.59%	-
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah		91.30%	-
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	84.19	80.60	lebih rendah dibandingkan Prov Jatim
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	baik	Sangat Baik	lebih tinggi dibandingkan kab
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	baik	Sangat Baik	lebih tinggi dibandingkan kab

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 10 indikator terdapat 1 (satu) indikator yang realisasinya sama dengan realisasi kab/kota lain dan terdapat 2 (dua) indikator yang realisasinya lebih rendah dari provinsi jawa timur/nasional. 3 (tiga) indikator yang realisasinya lebih tinggi dari rata-rata kabupaten / kota di provinsi Jawa timur. dan sisanya belum tersedia data pembanding

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	data rilis hanya sampai tahun 2022	dilaksanakan komitmen kepala Perangkat Daerah dalam pemenuhan IKK
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Dilakukan Perubahan Perbup terkait mekanisme pemberian bantuan Beasiswa	Pemberian Bantuan Beasiswa diberikan By Name By Adress dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ddan didasarkan pada DTKS
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	penyederhanaan prosedur pengajuan produk hukum	meningkatkan target kinerja
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	terdapat bantuan UMKM dan layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas.	dilakukan koordinasi secara intens dengan OPD terkait
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	komitmen bersama seluruh OPD dan update pelaksanaan sesuai ketentuan dari LKPP	koordinasi dan monev secara berkala
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	komitmen kepala daerah dan perbaikan tata kelola BUMD	fasilitasi dan monev kinerja secara berkala
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	dilakukan monev secara berkala oleh tim TEPR	penggunaan sistem Informasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap capaian kinerja OPD

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	Perencanaan Kinerja belum memenuhi standar yang berkualitas	Mereviu kembali dokumen perencanaan kinerja
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	penggunaan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan pimpinan	pemanfaatan teknologi informasi untuk mencounter berita hoax
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	penyederhanaan persyaratan pelayanan umum	reviu SOP secara berkala

D. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	PAGU ANGGARAN	REALISASI	capaian
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1.374.999.268	668.449.640	48.61
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	38.104.494.806	28.664.446.000	75.17
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	941,335,000.00	859.222.589	91.28
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	558,665,000.00	490.611.800	87.82

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	999.999.867	723.782.722	72.38
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	1.000.000.000	484.139.416	48.41
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	1.249.729.371	623.235.230	49.87
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	1.000.000.000	633.716.720	63.37
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4.000.000.000	3.427.891.358	85.70
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	60.174.845.593	54.304.441.387,08	90.24
JUMLAH		109.404.068.905	90.859.936.862.08	83.05

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Pagu anggaran untuk sekretariat daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebesar Rp.109.404.068.905 dan terealisasi sebesar Rp90.859.936.862.08 atau 83.05% capaian tersebut termasuk kategori "TINGGI"

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	94.53%	48.61%	
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	67.63%	75.17%	
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	109.67%	91.28%	
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	127.47%	87.82%	
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	100%	72.38%	
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	118.12%	48.41%	
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	121.73%	49.87%	
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	97.11%	63.37%	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	100%	85.70%	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	100%	90.24%	
Rata-rata		103.62	83.05%	6.96
Kategori		SANGAT TINGGI	TINGGI	

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. . Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

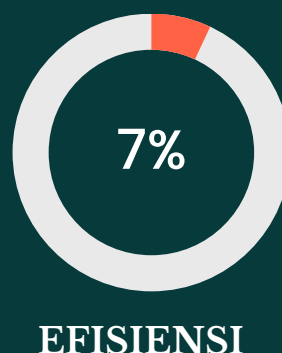
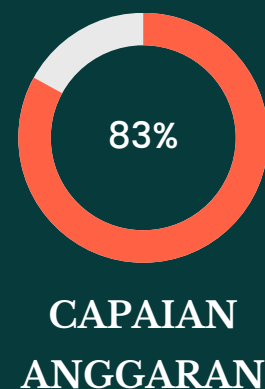
CKi : Capaian keluaran i

Dengan mengacu pada rumus tersebut maka diperoleh efisiensi sebagai berikut :

$$E = \frac{6.798.965.837.50}{97.658.902.699.58} \times 100\%$$

$$= 6.96$$

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 103.62% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 83.05% dengan kategori "TINGGI" dan efisiensi sebesar 6.69%



SASARAN I :

TERWUJUDNYA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SECARA AGILE DAN INKLUSIF SERTA KEBIJAKAN BIDANG HUKUM YANG HARMONIS

INDIKATOR SASARAN 1.1 :

NILAI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dilihat bahwa nilai LPPD tahun 2022 adalah 3,0721 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 3.25 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 94.53% dengan kategori "SANGAT TINGGI".

Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp1.374.999.268 terealisasi sebesar Rp668.449.640 atau 48.61%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

1. Penataan Administrasi Pemerintahan
2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah



PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN LPPD



DESK PENYUSUNAN LPPD
PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR SASARAN 1.2 :

PERSENTASE KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DIFASILITASI

Berdasarkan hasil rekapitulasi kebijakan kesejahteraan rakyat dapat dilihat bahwa Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi tahun 2024 adalah 67.62 dengan kategori “sedang”. Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp38.104.494.806 terealisasi sebesar Rp28.146.700.000 atau 73.87%

KEBIJAKAN	USULAN	REALISASI
HIBAH LEMBAGA	65	55
HIBAH TEMPAT IBADAH	389	321
BEASISWA	102	0
TOTAL	556	376



Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

INDIKATOR SASARAN 1.3 : PERSENTASE PRODUK HUKUM YANG DITETAPKAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi produk hukum yang ditetapkan dapat dilihat bahwa Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tahun 2024 adalah 98.70 jika dibandingkan dengan target 90% maka capaian kinerja sebesar 109.67% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp941,335,000.00 terealisasi sebesar Rp859.222.589 atau 91.28%.

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 2 sub kegiatan antara lain :

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

KEBIJAKAN	USULAN	REALISASI
PERDA	10	10
PERBUP	75	71
SK, , SE, MoU	1435	1435
total	1.520	1516



Rapat Koordinasi Lanjutan
membahas Program
Pembentukan Perda 2025

INDIKATOR SASARAN 1.4 :

INDEKS CAPAIAN KABUPATEN PEDULI HAM

Berdasarkan hasil penilaian kementrian HAM dapat dilihat bahwa Nilai Rata-rata Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten Gresik tahun 2024 adalah 95.6 jika dibandingkan dengan target 75% maka capaian kinerja sebesar 127.47% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp558.665.000 terealisasi sebesar Rp490.611.800 atau 87.82%. Pencapaian tersebut ditunjang dengan sub kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum

Nilai Ham ditunjang oleh beberapa aksi antara lain :

- Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.
- Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum
- Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas
- Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama



Focus Group Discussion
Pengembangan Pesantren
Ramah Anak

SASARAN II :

TERWUJUDNYA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA AGILE DAN BERDAYA SAING SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABLE

INDIKATOR SASARAN 2.1 :

KUALITAS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



Layanan Konsultasi Penyedia
di Loker PBJ MPP

Berdasarkan hasil penilaian dari LKPP dapat dilihat bahwa Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah level 3 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 100% dengan kategori "SANGAT TINGGI".

Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp999.999.867 terealisasi sebesar Rp723.782.722 atau 72.38%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

INDIKATOR SASARAN 2.2 :

RATA - RATA CAPAIAN KINERJA BUMD



Rapat Tindak lanjut
permodalan Perumda Giri Tirta



Rencana Bisnis Bank (RBB)
Tahun 2025 Perumda BPR
Bank Gresik

Berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan BUMD dibandingkan dengan target pendapatan BUMD dapat diketahui bahwa Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD tahun 2024 adalah 88.59 jika dibandingkan dengan target 2024 75% maka capaian kinerja bagian perekonomian dan SDA adalah 118,12% dengan kategori "SANGAT TINGGI".

Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000 terealisasi sebesar Rp484.139.416 atau 48.41%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

NO	BUMD	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	GIRI TIRTA	260.669.428.000	217.183.944.710	83.32%
2	GRESIK MIGAS	61.779.388.896	62.165.299.649	100.63%
3	BPR BANK GRESIK	14.105.042.487	11.540.338.414	81.82%
RATA-RATA		61.779.388.896	62.165.299.649	88.58%

INDIKATOR SASARAN 2.3 :

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA APBD PERANGKAT DAERAH



RAPAT KOORDINASI DAN
EVALUASI APBD TAHUN 2024
TRIWULAN III



DESK CAPAIAN KINERJA OPD

Berdasarkan perhitungan realisasi APBD dibandingkan dengan Pagu anggaran Tahun 2024 dapat diketahui bahwa Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah diatas 80% adalah sebesar 91.30 atau sebanyak 42 OPD jika dibandingkan dengan target 75% maka capaian kinerja sebesar 121,73 dengan kategori "SANGAT TINGGI".

Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp1.249.729.371 terealisasi sebesar Rp623.235.230 atau 49.87%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan,
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	APBD	3,9 T	3,6T	93.03%

SASARAN III :

TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG ORGANISASI SECARA AGILE (AKAS) SERTA PELAYANAN PROTOKOL, KOMUNIKASI PIMPINAN, DAN UMUM YANG RESPONSIF

INDIKATOR SASARAN 3.1 :

PREDIKAT AKIP

Berdasarkan Hasil penilaian sapip tahun 2024 adalah 80.60 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 83 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 97.11% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 633.716.720 atau 63.37%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	26,43	25,24
2. Pengukuran Kinerja	30	23,93	23,72
3. Pelaporan Kinerja	15	12,96	13,03
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,61	18,61
Nilai Hasil Evaluasi	100	81,93	80,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A



DESK PENYUSUNAN POHON KINERJA

INDIKATOR SASARAN 3.2 : INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN

Berdasarkan Hasil survey kepuasan layanan keprotokolan menggunakan aplikasi sukma e-jatim maka nilai SKM tahun 2024 adalah 91.56 92.39 kategori "Sangat Baik" jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar kategori "sangat baik" maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 100% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp4.000.000.000 terealisasi sebesar Rp.3.427.891.358 atau 85.70%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

1. Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan
2. Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan
3. Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan



LAYANANA KEPROTOKOLAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN PIMPINAN

INDIKATOR SASARAN 3.3 :

INDEKS KEPUASAN PELAYANAN UMUM

Berdasarkan Hasil survey kepuasan layanan keprotokolan menggunakan aplikasi sukma e-jatim maka nilai SKM tahun 2024 adalah 92.39 kategori "Sangat Baik" jika dibandingkan dengan target tahun 2024 kategori "sangat baik" maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 100% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp.60.174.845.593,00 terealisasi sebesar Rp.54.304.441.387,08 atau 90.24%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah



LAYANANA UMUM

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 103.62% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 83.05% dengan kategori "TINGGI" dan efisiensi sebesar 6.96%.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam PAPBD Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.109.404.068.905 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.908.599.36.862.08 atau 83.05%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

SARAN

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

- komitmen bersama kepala Perangkat Daerah dalam pemenuhan IKK
- Pemberian Bantuan Beasiswa diberikan By Name By Adress dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan didasarkan pada DTKS
- penyederhanaan prosedur pengajuan produk hukum
- dilakukan koordinasi secara intens dengan OPD terkait
- koordinasi dan monev secara berkala terkait pelaksanaan pengadaan barang jasa
- fasilitasi dan monev kinerja BUMD secara berkala
- penggunaan sistem Informasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap capaian kinerja OPD
- Mereviu kembali dokumen perencanaan kinerja sekretariat daerah
- pemanfaatan teknologi informasi untuk mengcounter berita hoax
- reviu SOP secara berkala

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN PK PAPBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH
Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	1	Predikat AKIP	83
		2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Sangat Baik
		3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Sangat Baik
2	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.25
		2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100 %
		3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90 %
		4	Nilai Peduli HAM	75
3	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	3
		2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75 %
		3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 65,174,845,593	PAPBD
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 40,979,494,074	PAPBD
3	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 3,249,729,238	PAPBD
Jumlah			Rp. 109,404,068,905	

PIHAK KEDUA
Pit. BUPATI GRESIK


AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK


ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LAMPIRAN PK APBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

PIHAK KEDUA

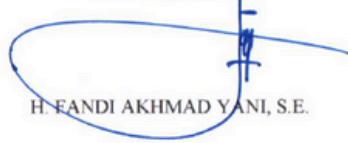
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	1 Predikat AKIP	83	
		2 Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	
		3 Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	
2	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	1 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)	3.25	
		2 Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100 %	
		3 Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90 %	
		4 Nilai Peduli HAM	75	
3	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akutable	1 Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	3	
		2 Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75 %	
		3 Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75 %	
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 60,359,520,714	APBD
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 40,979,494,075	APBD
3	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 3,249,729,238	APBD
Jumlah			Rp. 104,588,744,027	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK


Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

